

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi mengamanatkan negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas kebencanaan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di tanah air didasarkan oleh semangat mengimplementasikan amanat ini untuk melindungi rakyat yang hidup di wilayah yang memiliki kondisi geografis dan geologis rawan terjadi bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Wilayah Indonesia yang berada di Cincin Api Pasifik (*ring of fire*), di atas lempengan tektonik yang tidak stabil membuat Indonesia sering mengalami bencana letusan gunung api, gempa dan tsunami. Cincin Api Pasifik adalah daerah yang memiliki banyak sesar atau zona rekahan yang memanjang sekitar 40 ribu kilometer mulai dari Chili, Jepang, dan kemudian berhenti di Asia Tenggara. Sekitar 90 persen dari semua gempa bumi di dunia dan 80 persen gempa bumi terbesar di dunia terjadi di sepanjang daerah Cincin Api Pasifik ini. Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sekitar 5000 kali gempa besar dan kecil terjadi di Indonesia setiap tahunnya.

Meskipun kondisi geografis di cincin api ini memberikan tanah yang subur untuk ditanami, sumber daya alam yang melimpah di bawah tanah dan pemandangan alam yang indah untuk pariwisata, namun bencana alam yang ditimbulkan menyebabkan kerugian rata-rata 22 triliun rupiah setiap tahunnya. Bahkan gempa dan tsunami di Palu dan Donggala baru-baru ini juga memunculkan bencana baru, *likuefaksi*, dimana tanah bergerak dan bergulung ke bawah yang tentu saja menimbun dan membenamkan apa saja yang ada di atas permukaan. Dampak dari kejadian likuefaksi ini tentu saja tidak sederhana dan perlu penanganan yang sama sekali baru dan berbeda.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendorong tata kelola penanggulangan bencana di Indonesia untuk tidak hanya fokus pada upaya penanganan respon darurat semata, melainkan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan risiko bencana secara komprehensif. Selain itu, sesuai dengan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana juga diharapkan dapat mendorong penguatan kapasitas pemerintah daerah selaku ujung tombak penanggulangan bencana di Indonesia. Dengan memahami bahwa bencana adalah urusan semua orang, UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga diharapkan dapat memfasilitasi keterlibatan masyarakat sipil dan dunia usaha, selain pemerintah selaku pemangku kewajiban, untuk terlibat dalam pengurangan risiko bencana di Indonesia.

Saat ini tantangan-tantangan dalam penanggulangan bencana sesungguhnya juga telah mengalami perkembangan dibandingkan dengan kondisi 11 (sebelas) tahun yang lalu. Pada tingkat nasional, pencantuman pengelolaan bencana dalam nawacita ketujuh yang lebih bernuansa ekonomi, menunjukkan keinginan pemerintahan untuk mendorong penanggulangan bencana sebagai investasi ekonomi untuk menyelamatkan atau mengamankan hasil-hasil pembangunan. Titik berat perhatian presiden juga ditunjukkan dengan menyebut masalah asuransi kebencanaan sebagai salah satu solusi untuk mengurangi risiko ekonomi. Hal ini tentu saja berbeda dengan cara-pandang konvensional yang melihat penanggulangan bencana sebagai aktivitas penyelamatan nyawa (*life-saving activities*).

Tantangan lain yang juga tidak kalah pelik adalah bagaimana melakukan harmonisasi dengan undang-undang lain, seperti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) secara implisit menekankan penanggulangan bencana adalah bagian dari urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib pemerintah daerah. Dengan demikian, penanggulangan bencana secara resmi telah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Selama kurang lebih satu dekade pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana beserta peraturan perundangan turunannya, disadari bersama bahwa permasalahan-permasalahan yang diharapkan dapat diperbaiki dengan lahirnya undang-undang tersebut ternyata masih terus berlanjut. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah masih adanya kelemahan koordinasi dan komunikasi, penanganan yang masih bersifat sektoral dan terfragmentasi, serta pandangan para pelaku penanggulangan bencana yang masih berorientasi pada pemberian bantuan fisik.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas maka perlu dilakukan penyempurnaan dengan melakukan penggantian terhadap UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan undang-undang baru agar lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana diperlukan pendalaman untuk menemukan solusi yang tepat dan akurat demi memperbaiki sistem penanggulangan bencana. Salah satunya dengan melakukan kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi Diplomasi Parlemen ke negara yang memiliki penanggulangan bencana yang terpadu yaitu negara Argentina.

B. Maksud dan Tujuan

Tujuan Kunjungan Kerja sebagai pelaksanaan fungsi diplomasi Parlemen Badan Legislasi DPR RI dalam penyusunan RUU tentang Penanggulangan Bencana adalah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan serta mengumpulkan informasi dan data yang relevan mengenai penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana.

Dari kunjungan kerja ke Argentina, diharapkan diperoleh beberapa kegunaan terutama yang terkait dengan:

- a. Regulasi tentang kebencanaan;
- b. Pengaturan mengenai mitigasi dan pencegahan;
- c. Pengaturan mengenai koordinasi kelembagaan;

- d. Asuransi kebencanaan;
- e. Pelibatan bantuan asing; dan
- f. Peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

C. Keterkaitan Negara Tujuan dengan Materi RUU tentang Penanggulangan Bencana

Argentina merupakan sebuah negara yang terletak di benua Amerika Selatan, yang menjadi salah satu negara terbesar yang menduduki urutan ke-8 terbesar di dunia. Argentina negara yang kaya akan sumber daya alam, memiliki teknologi pertanian yang maju serta populasi yang tingkat melek hurufnya tinggi dan industri yang beragam. Komoditas pertanian yang dihasilkan oleh Argentina di antaranya seperti anggur, biji bunga matahari, lemon, jagung, tembakau, teh, kedelai, kacang dan gandum. Selain sektor pertanian, beberapa industri penting bagi pertumbuhan ekonomi Argentina adalah industri pengolahan makanan, tekstil, kimia dan petrokimia, sepeda motor dan baja.

Pada tahun 2004 Argentina mengalami bencana yang cukup parah akibat gempa besar berskala 6,3 SR di Provinsi San Juan dan terasa di 13 (tiga belas) provinsi sekitarnya. Argentina juga pernah mengalami banjir besar di provinsi Santa Fe yang menyebabkan kerugian lebih dari USD 250 juta dan 116.000 jiwa kehilangan tempat tinggal. Pemerintah Argentina bersungguh-sungguh dalam mengantisipasi pengulangan kedua bencana tersebut agar tidak berdampak besar pada masyarakat.

Argentina merupakan negara dengan kesiapsiagaan bencana yang baik karena menerapkan konsep bahwa kesiapsiagaan adalah keharusan bukan pilihan tindakan. Mempertimbangkan buruknya dampak bencana pada jutaan manusia setiap tahun yang menyebabkan kerusakan besar dan kerugian secara ekonomi, Argentina menganggap investasi pada upaya preventif dalam kesiapsiagaan bencana jauh lebih menguntungkan dibanding mengatasi kerusakannya di kemudian hari. Mereka menganggap di luar perhitungan ekonomi sekalipun, kesiapsiagaan dapat secara efektif

menyelamatkan dan melindungi kehidupan dan mata pencaharian sehingga berkontribusi pada kelanjutan pembangunan masyarakat dalam jangka panjang.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja dalam rangka Pelaksanaan fungsi diplomasi parlemen untuk penyusunan RUU tentang Penanggulangan Bencana dilakukan pada tanggal 4 s/d 10 Februari 2019. Delegasi Diplomasi Parlemen melakukan kunjungan dan pertemuan dengan Parlemen Argentina di Buenos Aires, Duta Besar dan Staf Kedutaan Besar RI di Argentina dan kantor Perlindungan Sipil Kementerian Keamanan Argentina di Buenos Aires.

B. Susunan Anggota Delegasi

Susunan Anggota Delegasi Diplomasi Parlemen Badan Legislasi DPR RI ke Argentina adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	FRAKSI/ NO. ANGGOTA	KETERANGAN
1.	H. TOTOK DARYANTO, SE	F-PAN A-489	KETUA DELEGASI/ WK. KETUA BALEG
2.	DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH., MH	F-PGERINDRA A388	KETUA BALEG/ ANGGOTA
3.	ARIF WIBOWO	PDIP A-193	WK KETUA BALEG/ ANGGOTA
4.	M. SARMUJI, SE., M.Si	F-GOLKAR A-287	WK KETUA BALEG/ ANGGOTA
5.	DRS. SUDIRO ASNO, Ak	F-PHANURA A-553	WK KETUA BALEG/ ANGGOTA
6.	IRMADI LUBIS	F-PDIP A-125	ANGGOTA
7.	TABRANI MAAMUN	F-GOLKAR A-241	ANGGOTA
8.	H. BAMBANG RIYANTO, SH., MH., M.Si	F-GERINDRA A-357	ANGGOTA
9.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, SH., LLM	F-PD A-421	ANGGOTA
10.	YANDRI SUSANTO, S. Pt	F-PAN	ANGGOTA

		A-494	
11.	DRS. FATHAN	F-PKB A-052	ANGGOTA
12.	ACH. BAIDOWI, S.SOS., M.Si	F-PPP A-532	ANGGOTA
13.	H. MUCHTAR LUTHFI ANDI MUTTY	F-PNASDEM A-34	ANGGOTA
14.	LIBER SALOMO SILITONGA, S.IP	SEKRETARIAT	
15.	SAPTA WIDAWATI		
16.	RAISAH SUARNI, SS., M.Hum	TENAGA AHLI	

C. Kegiatan Kunjungan

1. Pertemuan dengan Senado dan Diputados (Parlemen Argentina)

- Delegasi Diplomasi Badan Legislasi DPR RI diterima oleh *Senator Julio Cobos, Norma Durango, Omar Perotti, Pedro Brillard Pocard dan Deputes Astrid Hummel serta Alvaro González* di ruang Evita Peron parlemen Argentina. Para member parlemen menyambut kehadiran delegasi dengan hangat dan antusias menyebut bahwa Argentina justru yang perlu belajar dari delegasi (Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI) tentang penanggulangan bencana di Indonesia. Indonesia dianggap negara yang sangat kuat karena *survival* di tengah bencana yang sering terjadi.
- Dalam tanggapannya Senator Julio Cesar Cleto Cobos menyampaikan bahwa Argentina pada tahun 2016 telah mengesahkan UU No. 27.287 tentang Sistem Terpadu Nasional Pengelolaan Resiko Bencana Alam dan Perlindungan Sipil dan juga Dekrit No. 39/2017 tentang Dewan Nasional untuk Pengelolaan Terpadu Bencana Alam dan Pelindungan Sipil serta Dekrit No. 383/2017 tentang Perubahan Dekrit No. 39/2017.
- Bencana alam utama di Argentina adalah banjir tahunan yang sangat mempengaruhi seluruh sektor kehidupan masyarakat di Argentina dimana pendapatan utamanya adalah di bidang pertanian dan peternakan. Peraturan-peraturan tersebut menjadi payung hukum

bagi Dewan Nasional dalam mengkoordinasikan penanganan bencana alam secara terpadu mulai dari tingkat Pemerintah Provinsi hingga ke Ibu Kota.

- Dalam analisis yang disajikan pada tahun 2016 oleh Bank Dunia, ditetapkan bahwa 60% bencana alam di Argentina adalah banjir. Ini menjelaskan 95% dari kerugian ekonomi dan populasi yang terkena dampak bencana.
- Menurut studi tentang penilaian kerusakan, yang dilakukan oleh Komisi Ekonomi untuk Amerika Latin dan Karibia (ECLAC) pada 2017 ditetapkan bahwa banjir tahun 2016 menyebabkan kerugian \$64.145.235.549 dan berdampak pada 218.436 orang.
- Sebagian besar banjir regional yang mempengaruhi Republik Argentina terkait dengan fase hangat dari fenomena Osilasi El Nino-Selatan.
- Argentina melibatkan hampir semua kementerian dan lembaga untuk menangani bencana serta mengurangi dampaknya pada masyarakat, termasuk dalam hal ini asuransi, fasilitas kredit, keringanan pajak, beasiswa untuk anak sekolah selain pemulihan kondisi pasca bencana.
- Duta Besar Indonesia untuk Argentina juga berkesempatan mendampingi Delegasi Diplomasi Parlemen Badan Legislasi DPR RI ketika melakukan pertemuan dengan Parlemen Argentina sehingga bendera Merah Putih berjajar dengan bendera Argentina di ruang pertemuan.

2. Pertemuan Dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Argentina.

- Delegasi Diplomasi Parlemen Badan Legislasi DPR RI diterima oleh Niniek Kun Naryatie, Duta Besar RI untuk Argentina, Paraguay dan Uruguay.
- Duta Besar sangat mengapresiasi tujuan diplomasi parlemen, karena Argentina meskipun bukan negara dengan terpaan bencana

sebanyak dan sebesar Indonesia, namun mereka menangani bencana dengan sangat baik.

- Dalam pertemuan ini Duta Besar berkesempatan menyampaikan beberapa hal terkait politik di Argentina dan regulasi bencana berdasarkan bahan yang diberikan oleh parlemen Argentina, sebagai berikut:
 - ✓ Partai politik utama di Argentina: Cambiemos (Koalisi Pemerintah antara Partai Civic Coalition ARI, Republican Proposal dan Radical Civic Union); Citizen's Unity (Partai oposisi pimpinan Cristina Fernandez de Kirchner); Civic Front for Santiago; dan Dissident Peronists (berseberangan dengan Cristina).
 - ✓ Proses Legislasi di Argentina:
 - i. Drafting UU: Dilakukan di Komite Legislatif di *Chamber of Deputes* (CoD) dengan melibatkan pakar dan cendekiawan.
 - ii. Pembahasan: Dibahas oleh seluruh anggota Senat dan CoD dan harus disetujui oleh kedua kamar di Kongres Nasional.
 - iii. Persetujuan Presiden: Presiden dapat menyetujui, menolak (veto), atau menolak sebagian dari UU dalam waktu 10 hari kerja. Veto Presiden dapat dimentahkan oleh 2/3 mayoritas dari kedua kamar Kongres Nasional.
 - ✓ Bencana Alam di Argentina.

Bencana terjadi karena kejadian alam dan perubahan iklim.

Jenis bencana: banjir (sungai meluap atau laut pasang), banjir di perkotaan, badai, kekeringan, kebakaran hutan, gempa bumi.

Argentina cukup sering mengalami banjir, kasus cukup parah terakhir terjadi pada bulan November 2018 akibat meluapnya sungai Paraña dan sungai Uruguay dengan korban jiwa mencapai 50 orang.

Gempa bumi terbesar di Argentina terjadi pada tahun 1944 di daerah San Juan dengan magnitude 7,4 skala Richter yang menelan korban jiwa 10.000 orang. Gempa terakhir terjadi tahun 2010 di Salta dengan gempa 6,3 SR.

- ✓ Peraturan terkait Penanggulangan Bencana Alam di Argentina:
 - i. UU No. 27.287 tahun 2016 tentang Sistem Terpadu Nasional Pengelolaan Resiko Bencana Alam dan Perlindungan Sipil.
 - ii. Dekrit No. 39/2017 tentang Dewan Nasional untuk Pengelolaan Terpadu Bencana Alam dan Perlindungan Sipil.
 - iii. Dekrit No. 383/2017 tentang Perubahan Dekrit No. 39/2017.
- ✓ Argentina mengalami kerugian perkapita yang lebih besar dibandingkan negara lain di Amerika Latin. Argentina termasuk 10 besar negara yang terpapar banjir terbesar. Selama dua dekade terakhir kerugian akibat banjir melampaui \$3 milyar per tahun, setara dengan 0.7 percent GDP tahun 2012. Provinsi Buenos Aires adalah wilayah paling parah karena banjir. Tahun 2000, terjadi 1 kali banjir yang mengakibatkan kerugian hampir \$4.5 milyar dan mempengaruhi 5.5 juta penduduk.
- ✓ Institusi terkait Penanggulangan Bencana:
 - i. Kementerian Keamanan, Kementerian Agribisnis, serta Kemenristek dan Inovasi Produktif.
 - ii. Dewan Federal Penanggulangan Bencana Terpadu dan Perlindungan Sipil yang terdiri dari 1 wakil dari Pemerintah Pusat (Eksekutif), 1 wakil dari Provinsi dan 1 wakil dari Daerah Khusus Ibu Kota Buenos Aires.
 - iii. Lembaga terkait misalnya Universitas, Kelompok ilmuwan, NGO seperti Red Cross, IFRC, ADRA, dan Comisión Cascos Blancos.
 - iv. Nuclear Regulatory Agency.

3. Pertemuan dengan *Protección Civil* dan *White Helmets*

- Pertemuan ini seharusnya terpisah tapi karena ketersediaan waktu tuan rumah, disatukan dan bertempat di ruang rapat kantor *Protección Civil* Argentina.
- Delegasi Diplomasi Badan Legislasi DPR RI diterima oleh Maria Josefina Poggi, *Coordinadora de Relaciones Interministeriales y Provinciales Protección Civil* (Koordinator Hubungan Antar Kementerian dan Provinsi) dan Mariano Goicoechea, *Vice Director of White Helmets* (Wakil Direktur White Helmets).

Protección Civil

- Undang-Undang 27287 mengatur Sistem Terpadu Nasional Pengelolaan Resiko Bencana Alam dan Perlindungan Sipil (SINAGIR). Perlindungan Sipil di Argentina berada di bawah Kementerian Keamanan dan Kementerian Keamanan sendiri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri.
- Tujuan dari UU ini untuk menciptakan sistem nasional untuk manajemen risiko yang komprehensif dan perlindungan sipil yang bertujuan untuk mengintegrasikan tindakan dan mengartikulasikan fungsi lembaga pemerintah nasional, pemerintah provinsi, Kota Otonomi Buenos Aires dan kotamadya, organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil, untuk memperkuat dan mengoptimalkan tindakan yang ditujukan untuk pengurangan risiko, manajemen krisis dan pemulihan.
- SINAGIR ditujukan untuk perlindungan komprehensif terhadap orang, komunitas dan lingkungan terhadap risiko bencana dan dilakukan secara terintegrasi oleh dewan nasional dan dewan federal.
- SINAGIR merupakan instansi tertinggi keputusan, artikulasi dan koordinasi sumber daya negara nasional. Tujuannya adalah untuk merancang, mengusulkan, dan menerapkan kebijakan publik untuk manajemen risiko yang komprehensif.

- Dalam Undang-Undang tentang SINAGIR ditentukan fungsi dan tugas dari Dewan Nasional SINAGIR.
- Dewan Nasional SINAGIR dilaksanakan oleh Kekuatan Eksekutif Nasional dan akan diintegrasikan oleh organisasi dan departemen yang disebutkan dalam lampiran undang-undang ini. Dalam lampiran disebutkan hampir semua komponen negara, yaitu: Presiden, Wakil Presiden, Kepala Kabinet, Menteri Pertahanan, Sekretaris Perlindungan Sipil, Subsekretaris Pengurangan Risiko Bencana, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Produksi, Koordinator Hubungan Antar Kementerian dan Provinsi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, Kementerian Komunikasi, Kementerian Dalam Negeri, Pekerjaan Umum dan Perumahan, Lembaga Nasional Pencegahan Seismik, Institut Air Nasional, The white Helmets Commission, Lembaga Geografis Nasional, Layanan Meteorologi Nasional, Komisi Nasional Energi Atom, Kementerian Energi dan Mineral, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Transpotasi, Kementerian Pendidikan dan Olahraga, Layanan Penambangan Geologi, Kementerian Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial, Kementerian Luar Negeri dan Ibadah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata, Kementerian Agroindustri, termasuk semua institut penelitian yang berada di bawah kementerian dan perguruan tinggi negeri.
- SINAGIR dalam perencanaan nasional melakukan:
 - ✓ Pemetaan wilayah Argentina berdasarkan bencana yang pernah dan mungkin terjadi.
 - ✓ Pemetaan situasi pada bencana terakhir untuk menunjukkan kerugian dan dampak ekonomi pada masyarakat.
 - ✓ Merumuskan strategi objektif untuk mempromosikan dan memperdalam pengetahuan tentang fenomena hidrometeorologis dan meningkatkan kapasitas pemantauan kejadian yang berpotensi merusak untuk menjaga keselamatan publik dalam menghadapi banjir.

- ✓ Menetapkan komitmen provinsi untuk melakukan aksi sesuai dengan kewenangannya.
- SINAGIR membuat rancangan tindakan penanggulangan bencana di tingkat kota, provinsi dan pemerintah federal untuk setiap situasi darurat berikut mekanisme kontrolnya. Rancangan tindakan tersebut meliputi persiapan, pelaksanaan rencana, dan rehabilitasi. Pengajuan anggaran tergantung pada rancangan tindakan ini.
- SINAGIR juga yang mengkoordinasi bagaimana dukungan kepada korban bencana dapat diberikan, baik berupa asuransi, keringanan pajak dan kredit serta beasiswa untuk anak sekolah.

White Helmets

- The White Helmets Commission merupakan badan di Kementerian Luar Negeri Argentina yang bertugas merancang dan memberikan bantuan kemanusiaan atas nama Argentina. White Helmets melakukan kegiatannya melalui model kerja yang didasarkan pada kerja sama, solidaritas dan keterlibatan masyarakat. Ini sepenuhnya bersifat sipil dan didasarkan pada tim sukarelawan nasional dan internasional. Sejak didirikan pada tahun 1994, White Helmets sudah melakukan lebih dari 290 aksi bantuan kemanusiaan di 71 negara di 5 benua, 216 di antaranya terjadi di benua Amerika.
- Organisasi inisiatif Argentina ini beroperasi atas permintaan negara yang terkena dampak, dalam kerangka panggilan kemanusiaan internasional atau melalui tawaran yang harus diterima oleh negara yang terkena dampak berdasarkan prinsip-prinsip imparialitas, netralitas, kemandirian, dan humanitarisme. White Helmets juga mempromosikan praktek terbaik di bidang sukarelawan dan bekerja untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030* berkaitan dengan promosi dan penguatan berkurangnya risiko bencana di level global, regional, nasional dan lokal.
- Dengan 24 tahun pengalaman menghormati Hukum Internasional Humanitarian dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, White

Helmets merupakan bagian dari kebijakan negara dan alat diplomasi yang berharga dari kebijakan luar negeri Argentina.

- White Helmets bekerja dengan melibatkan sukarelawan dan NGO yang konsern dengan bantuan kemanusiaan dan diakui oleh PBB sebagai bagian dari partisipasi sukarela Argentina dalam kegiatan PBB di bidang pemulihan humanitarian, rehabilitasi dan kerjasama teknis untuk pembangunan.
- Bantuan internasional untuk bencana di Argentina masuk melalui Kementerian Luar Negeri yang menjadi lembaga negara yang mewadahi White Helmets.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan:

1. Argentina tidak berada di kawasan cincin api Pasifik sehingga tidak mengalami bencana alam sesering Indonesia dan memiliki jumlah penduduk sekitar seperenam dari jumlah penduduk Indonesia.
2. Bencana alam yang banyak terjadi di Argentina adalah bencana yang disebabkan perubahan iklim seperti banjir, kekeringan dan kebakaran hutan. Bencana-bencana tersebut cenderung lebih bisa diprediksi sehingga SINAGIR sebagai Sistem Terpadu Nasional Pengelolaan Resiko Bencana Alam dan Perlindungan Sipil dapat melakukan pemetaan wilayah dan membuat perencanaan tindakan sebelumnya.
3. Pemerintah Argentina sangat memberi perhatian pada kebijakan untuk antisipasi bencana karena kesadaran bahwa bencana alam dapat mempengaruhi hasil panen yang selanjutnya berdampak pada industri pengolahan pertanian dimana banyak tenaga kerja menggantungkan hidupnya dan berlanjut pada ancaman ketahanan pangan rakyat.
4. Argentina tidak memiliki lembaga khusus untuk menangani bencana namun dengan SINAGIR (Sistem Terpadu Nasional Pengelolaan Resiko Bencana Alam dan Perlindungan Sipil) semua kementerian dan lembaga bahkan presiden dan wakil presiden sendiri terlibat dalam penanganan bencana sesuai dengan wewenangnya masing-masing.

Argentina menganggap bencana sebagai urusan semua orang yang berarti semua pihak ikut terlibat dalam membantu dan mengurangi penderitaan yang dialami korban.

5. Argentina sangat konsern dalam mengurangi dampak bencana pada pemulihan hidup masyarakat, termasuk dalam hal ini dengan memberikan program asuransi, fasilitas kredit, keringanan pajak, dan beasiswa untuk anak sekolah.
6. Argentina memiliki satuan penanganan teknis bencana, *White Helmets*, yang tidak hanya menangani bencana di dalam negeri tapi juga di seluruh dunia bekerja sama dengan PBB.

B. Rekomendasi:

1. Belajar dari Argentina dalam penanggulangan bencana, pemetaan wilayah terdampak sangat penting untuk meminimalisir risiko. Pemerintah daerah terutama harus menaati asas keamanan dan keselamatan dalam pemberian hak mendirikan bangunan untuk pemukiman warga.
2. Identitas tunggal penduduk sangat penting untuk mengetahui jumlah korban terdampak dan untuk pengurusan program rehabilitasi, karena di Argentina untuk mendapatkan keringanan pajak warga korban bencana tetap harus memenuhi syarat ketaatan membayar pajak.
3. Penekanan yang tegas tentang kewenangan masing-masing lembaga dalam pengaturan penting untuk mengesampingkan ego sektoral dan mengatasi masalah koordinasi.
4. Perlu pemisahan yang tegas antara penanganan teknis bencana dengan program penanggulangan bencana terpadu sehingga tidak terjadi tumpang tindih penanganan di lapangan.
5. Sebaiknya pelibatan relawan dan bantuan swasta berada dalam koordinasi penuh pemerintah atau lembaga khusus yang berwenang.
6. Sebaiknya tetap dibuka kemungkinan untuk menerima bantuan kemanusiaan dari luar negeri tanpa melihat skala bencana namun koordinasi dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri sebagai bagian diplomasi dan hubungan kerjasama antarnegara.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi diplomasi parlemen Badan Legislasi DPR RI untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana ke Argentina. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan untuk penyempurnaan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, FEBRUARI 2019

KETUA DELEGASI,

ttd

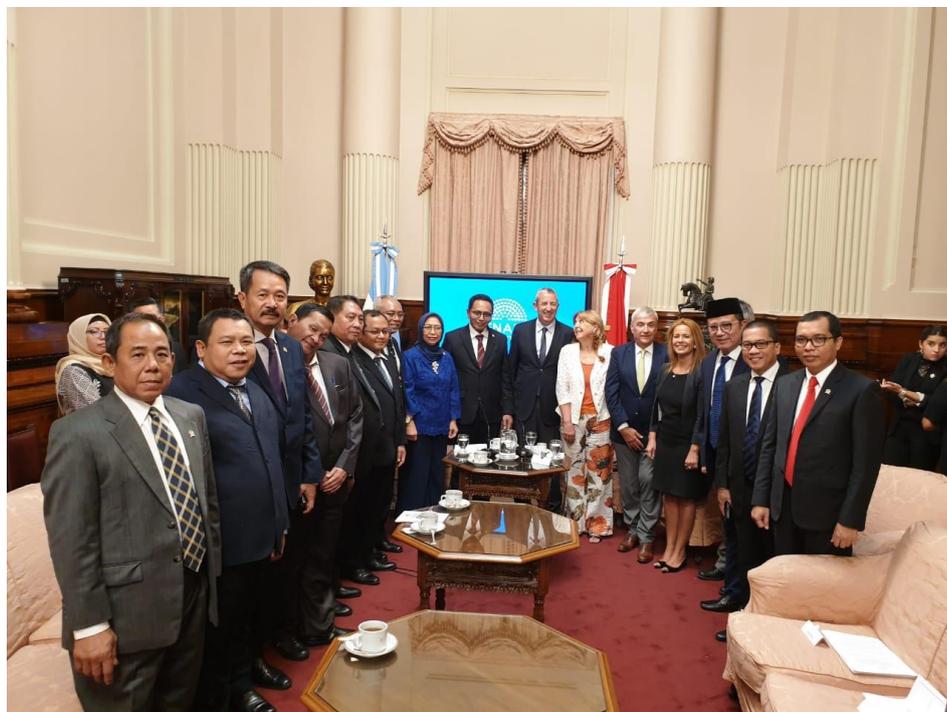
H. TOTOK DARYANTO, SE

A-489

Lampiran Foto:



Suasana pertemuan dengan Senado dan Diputados Argentina di Ruang Evita Peron, Parlemen Argentina.



Delegasi dan Duta Besar berfoto bersama Senado dan Diputados Argentina di Ruang Evita Peron, Parlemen Argentina.



Delegasi berfoto bersama di depan Gedung Parlemen Argentina.



Delegasi dalam pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Argentina, Paraguay dan Uruguay, Nuniek Kun Naryatie.



Penyerahan cendera mata kepada Duta Besar Indonesia untuk Argentina oleh Ketua Delegasi, H. Totok Daryanto, SE.



Delegasi di depan kediaman resmi Duta Besar Indonesia untuk Argentina.



Suasana pertemuan dengan *Protección Civil* dan *White Helmets*.



Delegasi berfoto bersama dengan *Protección Civil* dan *White Helmets* setelah pertemuan.